



RINGKASAN RISALAH RAPAT BERBASIS AGENDA

A. Informasi Umum

Tanggal Rapat : Selasa, 3 April 2012
Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 23

B. Kehadiran Anggota

- Fraksi Partai Demokrat 87 orang Anggota
- Fraksi Partai Golkar 58 orang Anggota
- Fraksi PDI Perjuangan 54 orang Anggota
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 28 orang Anggota
- Fraksi PAN 25 orang Anggota
- Fraksi PPP 16 orang Anggota
- Fraksi PKB 7 orang Anggota
- Fraksi Partai Gerindra 15 orang Anggota, dan
- Fraksi Partai Hanura 10 orang dari 17 orang Anggota.

C. Agenda Rapat

1. Pidato Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan.
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

D. Ucapan Penting Per-Agenda Rapat

1. Pidato Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan.

KETUA BPK HADI POERNOMO

ISI UCAPAN

- Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode akhir tahun 2003 sampai dengan semester II tahun 2011 menunjukkan sebanyak 16.778 kasus senilai Rp4,32 triliun.
 - Sisa kasus kerugian negara/daerah yang belum diselesaikan adalah sebanyak 9.859 kasus senilai Rp3,04 triliun.
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

KETUA RAPAT

ISI UCAPAN

- (RAPAT:SETUJU) Jadi hari ini kita berikan kepercayaan Pansus dengan mandat penuh untuk memperhatikan semuanya dan Paripurna depan kita putuskan akan kita ketok palu RUU tentang PKS dengan semuanya.
- Saya ingin memberitahukan bahwa RUU Keamanan Nasional yang kemarin sudah diberikan tugas kepada Pansus yang baru, sudah mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional pun dikembalikan kepada presiden kembali.

KETUA PANSUS RUU PKS DRS H ADANG DARADJATUN

ISI UCAPAN

- Pansus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran proses pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial.
- Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

F-PKS DRS MAHFUDZ SIDDIQ, MSi

ISI UCAPAN

- Kalau kita lihat misalnya saya ambil satu contoh, yang pertama, di dalam RUU ini ada satu status yang disebut status keadaan konflik.
- Ini satu terminologi baru yang mungkin saja dimunculkan dan diatur dalam undang-undang ini atau RUU ini, tetapi ini adalah satu terminologi baru yang tidak ada dalam undang-undang yang lain.

F-PD Ir HJ APA TIMO PANGERANG

ISI UCAPAN

- Juga masih menyangkut tentang Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik.
- Juga pada Pasal 39 ayat (2h) memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan dalam penanganan rehabilitasi.

F-PDIP DRS SIDARTO DANUSUBROTO, SH

ISI UCAPAN

- Saya baru menerima RUU ini pagi ini.
- Setelah membaca beberapa pasal memang ada beberapa pasal yang sedikit bermasalah.

F-PG Ir A EDWIN KAWILARANG

ISI UCAPAN

- Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Saya ingin sumbang saran terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus Hasanuddin, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- Walaupun saya bukan Anggota Pansus, saya membaca ini barusan saja dan saya melihat bahwa kata kuncinya adalah kata meminta.

F-PDIP DR Ir ARIF BUDIMANTA, MSc

ISI UCAPAN

- Tetapi ada hal yang memang secara khusus kita masih membutuhkan penjelasan yang lebih dalam, khususnya mengenai Bab VIII tentang Pendanaan.
- Pendanaan ini diatur oleh sejumlah pasal mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

PIMPINAN PANSUS DRS H ADANG DARADJATUN

ISI UCAPAN

- Memang dalam konteks masalah yang berhubungan dengan status keadaan bahaya mulai dari darurat sipil, militer dan perang, dalam naskah akademis, terutama kita berpegang kepada naskah akademis, bahwa RUU ini lebih *lex specialis*, dalam arti bahwa kondisinya adalah betul-betul di luar dalam konteks Perpu 23.

F-PDIP H TRI TAMTOMO, SH

ISI UCAPAN

- Begitu juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- Polri berkewajiban memberikan bantuan dukungan kepada pemerintah daerah.

F-PAN PROF DR ISMET AHMAD

ISI UCAPAN

- Oleh karena itu saya tetap menganggap bahwa keterlibatan ini untuk menangani konflik semacam itu di daerah tidak diperlukan.

F-PKS DRS H ADANG DARADJATUN

ISI UCAPAN

- Pertama, bahwa proses pembuatan RUU ini berasal dari DPR RI.
- Lalu yang kedua, apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu apabila membaca dengan baik, naskah akademik yang dibuat oleh DPR itu jelas bahwa RUU ini lebih bersifat *lex specialis*, dengan harapan bahwa pranata-pranata adat di daerah dengan dikoordinasikan oleh pemerintah itu lebih dimunculkan dalam konteks civil society.

F-PD MAYJEN TNI PURN YAHYA SACAWIRIA, SIP, MM

ISI UCAPAN

- Kaitannya dengan yang tadi disampaikan, semua dasar hukumnya itu sudah diwadahi, baik itu undang-undang tahun 1960, juga ada bahaya, Undang-Undang tentang TNI maupun tentang Undang-Undang tentang Polri.
- Naskah akademik juga mencantumkan di situ status-status atau strata-strata atau tingkatan-tingkatan bahwa tingkatan ini adalah pada saat tertib sipil sampai dengan posisi darurat sipil, sehingga supremasi sipil itu tetap masih berada dalam posisi di atas.

F-PD IGNATIUS MULYONO

ISI UCAPAN